

**Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung**

Oleh

Nurmalita Lestari

0109u059

**ABSTRAK**

Proses pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung terindikasi terjadinya korupsi dana APBD yang tidak sesuai dengan PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan. Proses pengawasan keuangan daerah (APBD) merupakan kegiatan yang sangat penting, agar pengawasan keuangan daerah (APBD) menjadi baik maka harus ditunjang dengan pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik yang baik juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD kota Bandung. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *sampling jenuh*, adapun sampel yang diambil oleh penulis yaitu seluruh anggota DPRD kota Bandung yang berjumlah sebanyak 50 responden. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survei menggunakan data primer dan menggunakan uji F dalam pengujian statistik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F diperoleh hasil sebesar 66,714, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung.

**Kata kunci :** Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengawasan Keuangan Daerah